

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, serta untuk mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan di Polsek Kota Baru Jambi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban penganiayaan dalam hubungan di luar nikah tetap memperoleh perlindungan hukum dari kepolisian tanpa memandang status hubungan dengan pelaku. Perlindungan yang diberikan mencakup perlindungan fisik melalui pengamanan, bantuan medis (visum), perlindungan psikologis, serta pendampingan dalam proses hukum berdasarkan Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendala utama yang dihadapi meliputi faktor internal seperti keterbatasan fasilitas khusus dan faktor eksternal seperti keengganan korban untuk melapor karena stigma sosial atau ketakutan.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam memberikan kepastian hukum sudah berjalan, namun diperlukan peningkatan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikis korban. Peneliti menyarankan agar Kepolisian Sektor Kota Baru terus memperkuat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta meningkatkan sosialisasi hukum melalui Bhabinkamtibmas. Hal ini penting untuk menumbuhkan keberanian korban dalam melaporkan tindak kekerasan guna meminimalisir praktik diskriminasi hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Penganiayaan, Hubungan di Luar Nikah, Polsek Kota Baru.

ABSTRACT

This research aims to determine the form of legal protection for female victims of the crime of maltreatment in out-of-wedlock relationships at the Kota Baru Sector Police, Jambi, and to identify the obstacles and efforts made by police officers in handling such cases. The research method used is empirical legal research with a legal sociology approach. Primary data were obtained through interviews with informants at the Kota Baru Sector Police, Jambi, while secondary data were obtained through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results show that female victims of maltreatment in out-of-wedlock relationships still receive legal protection from the police regardless of their relationship status with the perpetrator. The protection provided includes physical protection through security, medical assistance (visum et repertum), psychological protection, and assistance in the legal process based on Article 351 of the Criminal Code (KUHP) and the Witness and Victim Protection Act. The main obstacles faced include internal factors such as limited specialized facilities and external factors such as the victim's reluctance to report due to social stigma or fear.

Based on these findings, it is concluded that the role of the police in providing legal certainty has been implemented, but an improvement in a more sensitive approach to the victim's psychological condition is required. The researcher suggests that the Kota Baru Sector Police continue to strengthen coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and increase legal socialization through Bhabinkamtibmas. This is crucial to encourage victims' courage in reporting acts of violence to minimize legal discrimination practices in society.

Keywords: Legal Protection, Women, Maltreatment, Out-of-wedlock Relationship, Kota Baru Sector Police.